

Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal

Idil Syawfi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, idil.syawfi@unpar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah menelaah implikasi pandemi COVID-19 terhadap pola hubungan internasional. Hal ini tengah menjadi perdebatan diantara para pengkaji hubungan internasional, dimana terdapat pandangan yang optimis dan pesimis. Tulisan ini sendiri berargumen bahwa terjadi pergeseran pola hubungan internasional dari pola hubungan yang bersifat *positive sum* yang didasarkan kepada interdependensi, institusionalisme, multilateralisme, dan sistem demokrasi menjadi pola hubungan yang lebih mengarah kepada *zero sum game* dimana negara semakin memperkuat dirinya dan saling berkompetisi dengan negara lain.

Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Hubungan Internasional, Positif Sum, Zero Sum, interdependensi, multilateralisme, unilateralisme

Pendahuluan

Dunia internasional pada tahun 2020 ini terguncang keras oleh krisis pandemi global COVID-19. Isu kesehatan yang disinyalir terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 diakibatkan oleh virus yang diberi nama resmi SARS-COV-2. Berdasarkan data yang dirilis oleh *World Health Organization* (WHO) per 23 April sudah tersebar hingga ke 179 negara dan 33 teritorial di dunia. WHO sendiri telah menetapkan kondisi saat ini sebagai pandemi global dengan penilaian resiko *very high*. Terhitung kasus positif yang diakibatkan virus Corona ini telah mencapai 2.544.792 dengan jumlah kematian sejumlah 175.694 secara global. Kasus positif terbanyak mendera negara-negara besar diantaranya Amerika Serikat (800.926 kasus), Spanyol (208.389 kasus), Italia (187.327 kasus), Jerman (148.046 kasus), Inggris (133.499 kasus), dan Prancis (117.961 kasus).¹

Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan utama negara-negara di dunia adalah dengan menerapkan *physical distancing* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Namun, tingkatannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, ada yang secara keras melakukan *lockdown total* negaranya dengan melarang lalu lintas masuk dan keluar dari negara tersebut, pelarangan masuk bagi orang dari wilayah tertentu, karantina wilayah yang dinilai menjadi episentrum penyebaran virus, penutupan fasilitas umum dan kegiatan sosial tertentu, atau hanya dengan sekedar himbauan untuk melakukan *physical distancing* bagi warga negaranya.

Selain menjadi permasalahan kesehatan, penerapan *physical distancing* dalam menghadapi krisis ini juga berimbas ke bidang-bidang lain. Dalam bidang ekonomi dimana aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terbatas, OECD dalam

¹ World Health Organization, *Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) Situation Report-94*, diakses pada 24 April 2020, <https://www.who.int/docs/default->

source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-COVID-19.pdf?sfvrsn=b8304bf0_4

laporannya bulan Maret 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan turun ke angka 2.4 % pada tahun ini.² World Trade Organization (WTO) pada sisi lain memprediksi bahwa volume perdagangan dunia akan turun antara 13% hingga 32% pada tahun ini sebagai imbas dari pandemi COVID-19.³ Selain itu Chatham House juga mencatat hingga Maret 2020 terjadi penurunan sebesar 10% dalam pasar saham global.⁴

Permasalahan ekonomi tersebut di beberapa wilayah di dunia meningkat menjadi permasalahan di bidang sosial dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, World Bank memproyeksikan angka kemiskinan ekstrem akan meningkat dari 8.1% pada tahun 2019 menjadi 8.6% pada tahun 2020, atau terdapat tambahan sebesar 49 juta orang yang akan masuk kedalam tingkatan kemiskinan ekstrim.⁵ Permasalahan sosial lainnya yaitu peningkatan tingkat kriminalitas seperti yang terjadi di Meksiko,⁶ Nigeria,⁷ kekhawatiran lanjutan adalah berimbas ke bidang politik dimana kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintahannya, khususnya dalam hal kemampuan menghadapi pandemi ini, atau bahkan menjaral ke masalah keamanan nasional.

Dengan imbas yang bersifat multidimensional serta menjadi ancaman bersama yang dihadapi negara-negara di dunia. Pendekatan ideal yang seharusnya muncul adalah upaya bersama dengan peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani permasalahan ini.

Dimana, upaya-upaya tersebut telah terpupuk dalam hubungan internasional pasca perang dingin dimana dunia semakin terkoneksi, dengan tingkat interdependensi yang tinggi, semakin banyaknya inisiatif multilateralisme, yang kemudian dipermudah dengan adanya globalisasi. Namun disisi lain pendekatan unilateral menjadi pilihan utama yang diambil negara, *physical distancing* membuat negara mempersempit sekat batas-batas wilayahnya, serta pola hubungan yang bersifat *zero sum* menjadi suatu hal yang normal pada saat ini. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pandemi COVID-19 merubah pola hubungan internasional?

Perdebatan terkait Imbas Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional.

Para ahli hubungan internasional berdebat terkait bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dinamika hubungan internasional. Secara garis besar, terdapat pihak yang mengambil posisi pesimistis terkait pendekatan yang telah diambil oleh negara-negara di dunia. Di sisi lain terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini hanyalah menjadi krisis sesaat dan kondisi normal sesuai dengan status quo akan tetap kembali setelah krisis ini berakhir. Terdapat juga pendapat yang memprediksikan akan terjadi pergeseraan besar sistem dan kekuatan dalam sistem global.

² OECD (2020), *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7969896b-en>.

³ World Trade Organization, *Press Release: Trade set to Plunge as COVID-19 Pandemic Opens Global Economy*, diakses pada 24 April 2020. https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

⁴ Chatham House, *How to Fight the Economic Fallout From the Coronavirus*, diakses pada 24 April 2020, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/how-fight-economic-fallout-coronavirus?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNW5oL09ArST25i_y90TSIEGGv05ZSyEz_xbGUDgHVKwldHmgLhi8txoCbKUQAvD_BwE

⁵ Daniel Gerszon Mahler Et.al, *The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit*, <https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-COVID-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest>

⁶ The Guardian "Mexico murder rate reaches new high as violence rages amid COVID-19 spread", <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/mexico-murder-rate-homicide-coronavirus-COVID-19>

⁷ Guardian, "Why crime rate may rise after COVID-19", <https://guardian.ng/news/why-crime-rate-may-rise-after-COVID-19/>

Stephen M. Walt termasuk kepada ahli yang memandang pesimis kondisi saat ini. Dimana akan terjadi perubahan besar dalam sistem Internasional, hal yang menurut beliau tidak pernah berubah adalah sifat dasar politik internasional yang konflikual. Beliau menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 memaksa negara untuk memperkuat peranannya dan meneguhkan nasionalisme. Selain itu dengan melihat realitas respon yang diambil oleh negara-negara di dunia, Walt melihat Eropa dan Amerika telah menunjukkan kegagalannya sebagai kekuatan “barat” dalam merespon krisis ini, disisi lain Singapura dan Korea Selatan menjadi negara yang merespon krisis ini dengan sangat baik, Cina pada awalnya melakukan kesalahan pada saat ini menunjukkan respon yang baik. Realitas tersebut menunjukkan pergeseran kekuatan global dari “barat” menuju “Timur”. Pergeseran berikutnya yaitu akan terjadi kemunduran besar-besaran dari hiperglobalisasi, dimana negara akan memastikan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga hasil akhir yang akan terjadi yaitu dunia yang tidak terlalu terbuka, tidak terlalu bebas, dan tidak terlalu makmur.⁸

Sejalan dengan pendapat Walt, Robin Niblett berpendapat bahwa kondisi pandemi COVID-19 memaksa negara untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi isolasi ekonomi. Pemimpin-pemimpin politik di dunia akan mengambil langkah yang lebih isolasionis dan lebih disiplin dalam berhubungan dengan negara lain. Sehingga akan sulit untuk membayangkan dunia akan kembali kepada ide integrasi ekonomi global yang sebelumnya digagas oleh negara-negara di dunia.⁹

⁸ Lihat, Stephen M. Walt, “A World Less Open, Prosperous, and Free”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>

⁹ Robin Niblett, “The End of Globalization as We Know it”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>

Menambahkan pendapat-pendapat di atas, Richard N. Haass memandang bahwa krisis ini akan membawa negara-negara di dunia untuk lebih fokus ke dalam negara mereka masing-masing dan tidak akan terlalu hirau dengan hal-hal yang terjadi di luar sana. Negara akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri di dalam negeri dibandingkan mencoba mengatasi permasalahan regional atau pun global. Dunia juga akan mengalami resesi demokrasi di banyak negara, dimana peranan negara akan semakin besar termasuk dalam hal membatasi pergerakan dari populasinya.¹⁰

Pada sisi lain. Joseph S. Nye Jr, melihat krisis yang muncul karena pandemi COVID-19 ini sama dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Dimana hal ini tidak akan mengubah hal-hal yang bersifat fundamental dalam politik global. Nye berpendapat bahwa Globalisasi yang didasari oleh interdependensi antar benua merupakan hal fundamental yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, dan hal ini bukanlah sesuatu yang akan mudah berubah. Selain itu, *hard power* dan *soft power* yang telah dikumpulkan oleh negara-negara besar yang didasarkan kepada reputasi untuk menjelaskan kekuatan geografi, demografi, dan kerjasama ekonomi antar negara bukanlah sesuatu yang dapat berubah dalam waktu singkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal-hal fundamental tidak akan banyak berubah, sehingga secara sistematis tidak akan banyak merubah politik global.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, Shivshankar Menon berargumen bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 bukanlah berarti akhir dari dunia yang saling terkoneksi, namun ini

¹⁰ Richard N. Haass, “The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, *Foreign Affairs*, <https://www.foreignaffairs.com/articles/usa/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it>

¹¹ Joseph S. Nye, Jr, “No, the Coronavirus will not Change the Global Order”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/04/16/coronavirus-pandemic-Cina-united-states-power-competition/>

membuktikan adanya interdependensi. Di sisi lain, beberapa wilayah di dunia membuktikan bahwa masih ada harapan untuk adanya respon bersama untuk menghadapi permasalahan ini, dimana dibutuhkan munculnya kerjasama yang bersifat multilateral dalam menghadapi krisis ini.¹²

Hal tersebut diperkuat oleh Lionel Laurent yang secara khusus mengamati hal yang terjadi di Eropa. Beliau berpendapat bahwa penutupan wilayah perbatasan bukanlah jawaban yang tepat dalam menghadapi krisis ini. Aksi kolektif antar negara akan lebih menjadi pendekatan yang lebih masuk akal untuk diterapkan. Saling berbagi informasi antar negara serta pendekatan multilateralisme seharusnya akan lebih memudahkan koordinasi antar negara dalam menghadapi permasalahan ini.¹³

Di sisi lain, G. John Ikenberry menyatakan bahwa krisis yang melanda dunia pada saat ini merupakan ujian obagi sistem demokrasi. Mungkin yang akan menjadi pendekatan utama adalah melakukan proteksi domestik negara masing-masing. Namun, bagi negara seperti Amerika Serikat, mereka tidak akan dapat hanya bersembunyi di belakang batas wilayahnya, mereka akan bergerak untuk membangun kerjasama global. sehingga dapat dikatakan bahwa setelah berakhirnya krisis ini, demokrasi akan berevolusi untuk mencari bentuk baru yang lebih pragmatis.¹⁴

Suara yang lebih optimis juga diungkapkan oleh Nicholas Burns, yang menyatakan bahwa semangat kekuatan kemanusiaan sudah muncul secara global dalam menghadapi krisis COVID-19. Hal ini tidak

muncul dari negara, namun muncul dari lingkup domestik seperti dokter, perawat, pemimpin politik, dan masyarakat domestik yang menunjukkan semangat yang tinggi terhadap kemanusiaan dalam menghadapi krisis ini.¹⁵

Namun, dengan kondisi krisis saat ini yang masih belum menunjukkan titik puncaknya, serta kapan akan berakhir. Serta realitas bahwa belum ada negara yang benar-benar terbebas dari permasalahan ini, bahkan tetap dihantam melalui beberapa gelombang. Dunia menunjukkan pola hubungan yang semakin bersifat *zero sum* dibandingkan dengan sebelum adanya krisis. Hal yang sangat kontras dengan masa-masa sebelumnya khususnya pada masa paska perang dingin yang sangat kuat diwarnai oleh adanya globalisasi, interdependensi, semakin signifikannya peranan institusi global, serta hubungan-hubungan transnasionalisme yang menunjukkan pola hubungan antar negara yang bersifat *positive sum*.

Memasuki Dunia Paska-Liberal?

Dunia paska perang dingin ditandai dengan kemenangan ideologi liberal terhadap ideologi lainnya. hal ini dengan sangat gamblang dijelaskan oleh Francis Fukuyama dalam karya monumentalnya “The End of History”, dimana berakhirnya Perang Dingin merupakan pertanda kemenangan “barat” beserta dengan ide-idenya. Fukuyama mengklaim bahwa masa pasca Perang Dingin adalah masa pasca sejarah dimana perdebatan ideologis telah berakhir, dan sistem demokrasi liberal “barat” merupakan bentuk akhir dari perdebatan ideologis umat manusia.¹⁶

¹² Shivshankar Menon, “This Pandemic Can Serve a Useful Purpose”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>

¹³ Lionel Laurent, “Defeating a Virus that Respects no Boundaries requires Collective Action”, *Bloomberg*, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-fight-stop-shutting-eu-borders-and-work-together?srnd=opinion-politics-and-policy>

¹⁴ G. John Ikenberry, “Democracies Will Come out of Their Shell”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>

¹⁵ Nicholas Burns, “In Every Country, We See the Power of the Human Spirit”, *Foreign Policy*, <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>

¹⁶ Francis Fukuyama, “The End of History?”, dalam *The National Interest*, No.16, 1989, pp.3-18

Sistem internasional yang kemudian bersifat unipolar dengan menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya hegemon dalam tingkat global pada masa ini hidup dan menghidupi cara berfikir liberal “barat tersebut. *Democratic peace theory* dipercaya sebagai formula dalam menjaga stabilitas global, karena diyakini sesama negara demokrasi tidak akan saling berperang satu dengan lainnya.¹⁷ Dunia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan terkait pembangunan institusi internasional – dimana banyak sekali institusi dibangun berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan dari mulai bidang keamanan hingga kerjasama moneter bahkan perdagangan. Kerjasama dalam hal ini didasarkan kepada seperangkat prinsip, norma dan aturan yang mengatur hubungan antar aktor dalam sistem internasional.¹⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa multilateralisme menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan, dikarenakan mekanisme multilateral dipercaya didasarkan kepada prinsip demokrasi.¹⁹

Selain itu, dipercaya bahwa sistem internasional berada dalam kondisi *complex interdependence* dimana setiap negara saling terikat dengan negara lainnya tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintahan namun dalam hal *multiple channels* termasuk antara masyarakat di satu negara dengan masyarakat di negara lain. Selain itu dipercaya pada masa ini tidak ada lagi hierarki diantara isu-isu yang ada, sehingga setiap isu sama pentingnya yang membuat hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga membuat kekuatan militer tidak lagi memainkan peran sentral seperti pada masa Perang Dingin.²⁰

Kondisi tersebut didukung juga oleh perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang mendukung proses globalisasi sehingga dapat dikatakan hubungan transnasional menjadi semakin meningkat secara cepat. Hal ini juga menempatkan negara dalam posisi yang terbatas, dan hanya memainkan peranan sebagai regulator dalam kehidupan sektor privat. Dunia seakan menikmati kondisi ini, dimana hubungan antar negara bersifat *positive sum*, karena kerjasama dan mengintegrasikan diri dalam globalisasi memberikan keuntungan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global semakin positif, setiap negara berlomba-lomba mengintegrasikan diri dalam *global supply chain* agar mendapat bagian dari kue globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa menutup diri dari globalisasi dapat dikatakan bukanlah pilihan yang bijak, yang akan membuat negara tersebut tertinggal di belakang.

Kondisi ini berubah dengan drastis ketika negara-negara di dunia dilanda krisis pandemi COVID-19 pada akhir yang dinyatakan secara resmi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Negara merevisi perannya yang tadinya terbatas menjadi lebih agresif. Negara memperkuat dirinya, dan menunjukkan sikap yang koersif terhadap masyarakatnya dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus. Negara memberlakukan batasan bagi masyarakatnya baik dalam hal himbauan melakukan *physical distancing*, menutup kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat berkumpul seperti kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun universitas, bahkan hingga menerapkan karantina wilayah yang menjadi episenter penyebaran, atau bahkan melakukan *total lockdown* terhadap negaranya atau melarang masuk pendatang dari wilayah

¹⁷ Michael W. Doyle, “Three Pillars of the Liberal Peace” dalam *The American Political Science Review*, Vol. 99, No. 3, pp.463-466

¹⁸ Robert Keohane, “Twenty Years of Institutional Liberalism” dalam *International Relations*, Vol. 26, No. 2, 2012, pp. 125-138.

¹⁹ Robert O. Keohane, et.al, “Democracy-Enhancing Multilateralism” dalam *International Organization*, Vol. 63, No. 1, 2009, pp.1-31

²⁰ Robert O. Keohane dan Joseph S.Nye, Jr, *Power and Interdependence* 4th edition (2012, Boston: Longman) pp. 3-19

yang memiliki kasus penyebaran virus yang tinggi.

Penerapan hal tersebut sangat sulit dilakukan dalam konteks sistem demokrasi, di sisi lain akan lebih mudah diberlakukan dalam konteks negara yang menggunakan sistem otoritarianisme. Hal ini membuat negara yang memiliki sistem otoritarianisme lebih cepat dalam membuat kurva penyebaran virus di negaranya menjadi lebih rata karena memiliki keleluasaan untuk bertindak lebih agresif dibandingkan negara demokrasi.

Karena sifat virus yang bertansmisi antar manusia, negara dengan tingkat interdependensi yang tinggi terhadap dunia luar memiliki tingkatan kasus yang lebih tinggi. Sedangkan negara yang memiliki hubungan luar negeri yang terbatas kemudian memiliki resiko yang lebih rendah. Hal ini membuat negara mencoba menurunkan level interdependensinya dengan melakukan dua hal. Pertama, melakukan restriksi di batas-batas wilayahnya terhadap dunia luar. Bahkan jika kita lihat kasus di Eropa Barat, dengan tingginya tingkat kasus di Italia, negara-negara di kawasan tersebut secara berjamaah menutup wilayah perbatasannya bagi orang-orang yang berasal dan pernah berkunjung ke Italia.²¹ Hal yang sama juga diberlakukan oleh Amerika Serikat yang kemudian menutup perbatasannya bagi orang-orang yang berasal atau pernah berkunjung ke wilayah Eropa Barat, kawasan yang notabene berisi negara-negara aliansinya.²²

Kedua, melakukan swasembada untuk komoditas-komoditas yang diperlukan bagi masyarakat domestiknya, serta menutup pintu untuk ekspor kepada pihak lain. Hal ini dilakukan agar tidak muncul ketergantungan terhadap

komoditas dari luar negaranya. Selain itu dikarenakan terbatasnya komoditas tertentu seperti peralatan kesehatan, peralatan sanitasi, serta bahan pokok makanan, banyak negara melakukan penimbunan terhadap komoditas-komoditas tersebut dengan tujuan untuk mengamankan pasokan domestik.

Terkait dengan partisipasi negara dalam *global supply chain* yang didasarkan kepada asumsi *comparative advantage* yang dipercaya oleh kaum liberal akan menjadi faktor utama kerjasama antar negara. Sistem ini terbukti tidak bekerja dengan baik, khususnya ketika dihadapkan dengan krisis pandemi COVID-19 ini. Hal ini tampak dari ketergantungan dunia terhadap Cina yang menguasai mayoritas *global supply chain* sehingga stagnasi perekonomian Cina membuat stagnan juga perekonomian di negara-negara lain.²³

Hal lain yang dipercaya kaum liberal adalah multilateralisme melalui institusi internasional. Hal ini terbukti tidak berjalan dengan baik. Salah satu institusi yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah WHO, namun jika kita lihat proses politik di WHO berjalan sangat lambat khususnya jika kita berbicara terkait hal yang berhubungan dengan negara besar. WHO dalam kasus ini dianggap gagal melakukan lokalisir kasus sehingga menjadi pandemi global, selain itu WHO juga dianggap lamban dalam menetapkan kondisi pandemi karena berhubungan dengan Cina yang memiliki kekuatan politik yang cukup besar di dalam organisasi tersebut. Selain itu WHO juga diliat gagal menjalankan tugasnya dalam memantau

²¹ The Guardian, "EU countries take first cautious steps out of coronavirus lockdown",

<https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/eu-countries-coronavirus-lockdown-italy-spain>

²² The Guardian, "Coronavirus: US travel ban on 26 European countries comes into force",

<https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/eu-countries-coronavirus-lockdown-italy-spain>

²³ Alicia Garcia Herrero, "Companies must move supply chains further from Cina", *Bruegel*, <https://www.bruegel.org/2020/02/companies-must-move-supply-chains-further-from-Cina/>

ketersediaan peralatan kesehatan secara global.²⁴ Kegagalan ini kemudian dijadikan *scapegoat* bagi Amerika Serikat yang saat menghadapi kasus terkonfirmasi tertinggi, Presiden Trump memutuskan untuk menghentikan pendanaan dari negaranya kepada WHO, dan memilih untuk melakukan pendekatan unilateral dibandingkan pendekatan multilateral.

Unilateralisme sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi kasus ini, beberapa negara juga telah lebih fokus mengurus diri sendiri tanpa mengindahkan norma dan aturan internasional berdasarkan multilateralisme. Hal ini tampak dari beberapa organisasi regional yang gagal dalam melakukan pendekatan terkoordinir bagi negara-negara anggota di wilayahnya, dan kecenderungan negara-negara tersebut berjalan sendiri-sendiri. Contohnya seperti yang terjadi dengan Uni Eropa,²⁵ ASEAN,²⁶ dan kawasan-kawasan lainnya di dunia.

Hal lainnya yang kemudian juga mengemuka adalah kenyataan bahwa setiap negara saat ini sedang berusaha mencari pendanaan untuk dapat membiayai beban ekonomi imbas dari pandemi COVID-19 ini. Negara-negara di dunia saat ini saling berlomba-lomba untuk menawarkan surat hutangnya kepada para investor maupun lembaga donor. Sehingga dapat dikatakan terjadi kompetisi antar negara dalam mendapatkan pendanaan secara internasional.

Penutup

Pandemi COVID-19 yang mendera sistem internasional saat ini dapat dipastikan mengubah pola hubungan internasional.

Perubahan yang nyata adalah bahwa semakin tidak efektifnya pola hubungan yang didasarkan kepada perspektif liberal yang didasarkan kepada demokrasi, interdependensi, multilateralisme, yang diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan yang bersifat *positive sum*.

Pergeseran yang saat ini nampak, dunia semakin memasuki pola hubungan yang bersifat zero sum, dimana negara saling berkompetisi untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan dari pihak luar, secara agresif mengamankan dirinya dari paparan dunia luar, meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengarah kepada unilateralisme, yang difokuskan kepada kepentingan pribadinya.

Lebarnya pergeseran ini akan sangat ditentukan kepada seberapa dalam dan seberapa lama dunia akan mengalami krisis ini, semakin cepat dan semakin dangkal akibat dari krisis ini pergeseran yang terjadi akan semakin sedikit, namun jika akibatnya lebih dalam dan dalam jangka waktu yang lebih lama, sistem internasional akan semakin menjadi arena pertarungan antar negara dalam kondisi yang bersifat *zero sum*.

²⁴ Shahr Hameiri, "COVID-19: Why did global health governance fail?", *Lowy Institute*, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/COVID-19-why-did-global-health-governance-fail>

²⁵ Time, "The Coronavirus Outbreak Is a Critical Test for the European Union. So Far, It's Failing", <https://time.com/5805783/coronavirus-european-union/>

²⁶ Shafiah F. Muhibat, "COVID-19 in Southeast Asia: 10 Countries, 10 Responses", dalam *CSIS Commentaries* DMRU-051-EN, 2020, <https://www.csis.or.id/publications/COVID-19-in-southeast-asia-10-countries-10-responses>